



UPAYA (BP2MI) BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI RIAU

Rahmad Hidayat, M Zulherawan

Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pengawasan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Riau. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kasus pekerja migran non-prosedural yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti eksploitasi, perdagangan orang, dan lemahnya perlindungan hukum. BP2MI sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keberangkatan pekerja migran berjalan aman dan sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat BP2MI, petugas imigrasi, serta agen penempatan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI telah melakukan berbagai upaya pengawasan, antara lain sosialisasi kepada calon PMI, pemeriksaan kelengkapan dokumen, kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan penanganan kasus PMI bermasalah. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya prosedur legal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan BP2MI perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lintas instansi, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural.

Kata Kunci: BP2MI, Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan, Perlindungan, Riau.

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi penting terhadap

perekonomian nasional melalui pengurangan pengangguran dan peningkatan remitansi. Namun, di balik

*Correspondence Address : rahmadhidayat327@student.uir.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i3.2026. 782-785

© 2026UM-Tapsel Press

kontribusi tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan serius, terutama tingginya keberangkatan PMI secara non-prosedural yang berisiko menimbulkan eksploitasi, perdagangan orang, serta lemahnya perlindungan hukum. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada tahap pra-keberangkatan.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga pelaksana kebijakan memiliki peran strategis dalam pengawasan keberangkatan PMI agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang rawan menjadi jalur keberangkatan PMI non-prosedural, sehingga memerlukan pengawasan yang optimal. Namun, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya BP2MI dalam pengawasan keberangkatan PMI di Provinsi Riau serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, guna mendukung penguatan sistem perlindungan pekerja migran secara berkelanjutan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. PMI berperan penting dalam pembangunan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa negara. Namun, proses migrasi tenaga kerja juga mengandung risiko tinggi, terutama

apabila dilakukan secara non-prosedural, yang dapat mengakibatkan eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perdagangan orang.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penempatan PMI, pengawasan mencakup kegiatan pencegahan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap seluruh proses keberangkatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif membutuhkan koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta sistem informasi yang memadai.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI, khususnya pada tahap pra-keberangkatan dan kepulangan. Peran BP2MI dalam pengawasan keberangkatan PMI meliputi sosialisasi prosedur, verifikasi dokumen, koordinasi lintas sektor, serta penanganan PMI bermasalah. Optimalisasi peran BP2MI menjadi faktor kunci dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural dan meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk menganalisis upaya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pengawasan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh melalui **wawancara**, **observasi**, dan **dokumentasi**. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan petugas BP2MI Provinsi Riau serta pihak terkait yang terlibat dalam proses pengawasan keberangkatan PMI. Data

yang terkumpul dianalisis melalui tahapan **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan** guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan serta kendala yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Riau telah melaksanakan pengawasan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui beberapa bentuk kegiatan utama. Upaya tersebut meliputi sosialisasi prosedur keberangkatan kepada calon PMI dan masyarakat, pemeriksaan serta verifikasi kelengkapan dokumen, dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi, kepolisian, serta pemerintah daerah. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keberangkatan secara legal dan risiko yang ditimbulkan oleh penempatan non-prosedural. Sementara itu, pemeriksaan dokumen dilakukan untuk memastikan calon PMI memenuhi persyaratan administratif dan hukum sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

Selain itu, BP2MI juga berperan dalam penanganan kasus PMI bermasalah yang teridentifikasi selama proses pengawasan. Bentuk penanganan tersebut meliputi pendataan, pendampingan administratif, serta koordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Temuan ini menunjukkan bahwa BP2MI telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berupaya memberikan perlindungan pada tahap pra-keberangkatan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan keberangkatan PMI di Provinsi Riau belum sepenuhnya

berjalan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas calon PMI. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh jalur keberangkatan secara maksimal. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan masih belum berjalan secara konsisten, sehingga membuka peluang terjadinya keberangkatan PMI non-prosedural.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pengawasan adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap prosedur keberangkatan yang legal. Sebagian calon PMI masih memilih jalur non-prosedural karena dianggap lebih cepat dan mudah, tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan keselamatan kerja di negara tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan administratif perlu didukung oleh pendekatan edukatif dan partisipatif yang berkelanjutan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini sejalan dengan konsep pengawasan yang menekankan pentingnya pengendalian berkelanjutan, koordinasi kelembagaan, dan dukungan sumber daya yang memadai. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas lembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan BP2MI, serta pemanfaatan sistem pengawasan yang terintegrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keberangkatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Riau.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Riau telah menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi prosedur keberangkatan kepada calon PMI dan masyarakat, pemeriksaan serta verifikasi kelengkapan dokumen, dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen BP2MI dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural serta meningkatkan perlindungan PMI pada tahap pra-keberangkatan.

Namun demikian, efektivitas pengawasan keberangkatan PMI di Provinsi Riau masih belum optimal. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta belum maksimalnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya prosedur keberangkatan yang legal turut berkontribusi terhadap masih terjadinya keberangkatan PMI secara non-prosedural.

Dengan demikian, pengawasan keberangkatan PMI oleh BP2MI memerlukan penguatan yang berkelanjutan agar dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sinergi lintas lembaga, serta pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta meminimalkan risiko permasalahan yang dihadapi PMI sejak tahap pra-keberangkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2021). *Pedoman Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: BP2MI.

Handoko, T. H. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lestari, R., & Zulherawan, M. (2025). The Role Of The Women's Empowerment, Child Protection And Community Empowerment Service (DP3APM) Of Pekanbaru City In Advocacy For Victims In Fulfilling The Rights To Child Support. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 196-206.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Novella, V., & Zulherawan, M. (2025). VICTIMOLOGY ANALYSIS OF SOCIETAL LABELING ON FEMALE UNIVERSITY STUDENTS WHO VISIT NIGHTCLUBS (A STUDY ON X, Y, AND Z IN PEKANBARU). *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 184-190.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zulherawan, M., Mustaqim, M. R., & Hakim, A. R. (2025). Upaya Preventif Pengembangan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pendidikan Guru SMA/SMK Kabupaten Pelalawan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 443-456.